

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku;

- Abdul Kadir, Muhammad., *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013
- Adji, Sution Usman, *dkk.*, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Amiruddin dan Asikin, Z.H., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ali, Zainuddin., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Ardian, Agnes Vira., *prospek perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dalam kesenian tradisional di Indonesia*, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008
- Abraham Kaplan, and Harorl D. Lasswell., *Power and Society, A Framework for Political Inquiry*, forth printing, Yale University Press, New Haven, 1961
- Danuredjo, S.L.S., *Otonomi di Indonesia Ditinjau Dalam Rangka Kedaulatan*. Jakarta, 1997
- Djubedi, Daud., *Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Genta Press, 2015
- Ediwarman, *Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2011
- E, Utrecht., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Bandung: Universitas Padjajaran, 1960

- Fachruddin, Irfan., *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004
- Hoessein, Bhenyamin., *Berbagai Faktor yang Memengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II, Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi Negara*, Disertasi Program Pascasarjana, 1993
- Ibrahim, Jhony, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Lubis, M. Solly., *Filsafat Ilmu dan Penelitian.*, Bandung: Mandar Maju, 1999
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian 146 um*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan ke-5. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013.
- Mertukesumo, Sudikno., “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, Yogyakarta:Liberty, 2003
- M. Hadjon, Philipus, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*”, Surabaya:PT.Bina Ilmu, 1987
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta :Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003
- Nugraha, Safri dkk., *Hukum Administrasi Negara*, Depok: CLGS-FHUI, 2007
- Nicolai, P & Oliver, B.K., *Bestuursrecht*, Amsterdam, 1994
- Purwosutjipto, H.M.N, *Hukum Dagang (Hukum Pelayaran Darat dan Laut)*. Jakarta: Djambatan, 2009

- Permana, Login., “ *Analisis Prospek Perlindungan Hukum Terhadap Laut Semarang Dari Dampak Negatif Lalu Lintas Pelayaran*”, Semarang:Univ Semarang, 2011
- Raharjo, Satjipto., “Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia”, Jakarta:Kompas, 2003
- Salam, Dharma Setyawan., *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003
- Soemitro, Ronny Hanitijo., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Ke-5, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994
- Sembiring, Sentosa, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Pelayaran*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2009.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004
- Soedarsono, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakrata:Rineka Cipta, 2004
- Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- , *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an*, Bandung:Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan, 2004
- Soedjono, Wiwoho, *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut*, Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Sukriono, Didik., *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi (Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi)*. Malang: Setara Press. 2013
- Sunindhia, Y.W., *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*. Jakarta: Erlangga, 1987
- Soekanto, Soerjono., *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1988
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

- Suhardi, Gunarto, “*Revitalisasi BUMN*”, Yogyakarta:Univ Atmajaya, 2007
- .Sutopo, H.B., *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta : UNS Press, 1998
- Stout H.D. *De Betekenissen van de wet*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994
- Walker III, Millidge Penderell., *Administration and Local Government in Indonesia*, Ph.D. Thesis, Berkley, University of Carolina, 1967
- Winarno, Surakhmad., *Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung : Tarsito, 1994
- Wignjosoebroto, Sutandyo., *Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda*, Malang:Bayumedia Publishing, 2004
- Yosafat, Christo, “*Tinjauan Yuridis Dampak Penerapan Asa Cabotage dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap Jasa Perhubungan Laut*”, Depok:UI, 2010
- Yonesyahardi, Muhammad Fikry, “*Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Mengenai Liberalisasi Pelabuhan Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Kasus : PT Pelabuhan Indonesia II (Persero))*”, Depok:UI, 2012

## **B. Undang-undang, Peraturan Pemerintah;**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

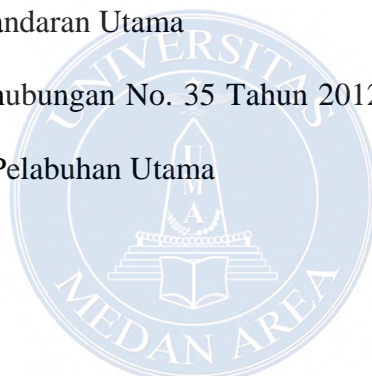
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan

Peraturan Pemerintah No.64 Tahun 2015 Tentang Kepelabuhan

Peraturan Menteri Perhubungan No. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama

Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama



### **C. Artikel, Makalah, Jurnal, Surat Kabar, Wawancara;**

Aris., Implementasi Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan.(Studi Tentang Standar KelayakanPelabuhan, di Pelabuhan Kelotok Kabupaten Penajam Paser Utara).Program Studi Ilmu PemerintahanFakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik, Universitas Mulawarman 2010.eJournal Ilmu Pemerintahan, 3 (1), 2015 : 253-265ISSN 0000-0000 ejournal.ip.fisip.unmul.ac .id.

Iskandar, *Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Perubahan Peruntukan, Fungsi, dan Penggunaan Kawasan Hutan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3, September 2011

-----, Implikasi Alih Kewenangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pasca Berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Artikel, Bengkulu, 11 juli 2015

- Jurnal “*Prakasa Infrastruktur Pembangunan Pelabuhan Indonesia*”, edisi 10 April 2012
- Moch. Choirul Huda, Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup”, Volume XVIII Edisi Mei No. 2 Tahun 2013
- Sadu Wasistiono, *Esensi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Makalah disampaikan pada Rakernas Asosiasi DPRD Kota-Se-Indonesia, Batam, 2005
- Hasil Rakorwasdanas (Rapat Koordinasi Pengawas Daerah dan Nasional) Tahun 2005
- Harian Surat kabar Sinar Harapan, Sabtu, 20 September 2003
- Harian Kompas, Perda Kota Cilegon No. 1/2001, *Semangat Melawan Monopoli*, Sabtu, 22 Nopember 2003
- Harian Kompas, Senin, 12 Juli 2004
- Harian Sinar Harapan, Jum’at, 30 Juli 2004
- Harian Kompas Cyber Media, Selasa 8 Agustus 2004
- Harian Kompas, Rabu, 11 Agustus 2004
- Harian Kompas, Kamis 12 Agustus 2004
- Harian Kompas, hari Jum’at, 13 Agustus 2004
- Harian Kompas, tanggal 16 Agustus 2005
- Wawancara dengan Bendahara FDB Bapak Rusli Ridwan pada tanggal 12 September 2016
- Wawancara dengan Kepala Seksi Analisa, Evaluasi&Tarif Bapak Jhonson Pangaribuan pada tanggal 12 September 2016
- Wawancara dengan Staff Seksi Fasilitas &Pelabuhan Bapak Ronal pada tanggal 14 September 2016

**D. Internet;**

<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, 2004), diakses tanggal 16 Januari 2015

<http://dedeandreas.blogspot.co.id/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>, diakses tanggal 15 Maret 2016

Kompas, 2008, “Transportasi Pelabuhan Indonesia”, dalam <http://www.pksplib.or.id>, diakses pada tanggal 17 maret 2015

<http://www.Kompas.com>“DaerahTidak Berhak Ambil Alih Pelabuhan”, diakses tanggal 20 September 2015.

<http://fajarfajrien.blogspot.co.id/2012/10/masalah-pembangunan-dan-penegakan-hukum.html>, diakses 14 Oktober 2016

[http://www.bumn-ri/news.detail.htm?news\\_id](http://www.bumn-ri/news.detail.htm?news_id), Pelindo bukan satu- satunya Pengelola Pelabuhan diakses pada tanggal 14 Oktober 2016

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0408/12/utama/1204169.htm>, Daerah tidak berhak ambil Alih Pelabuhan diakses pada tanggal 14 Oktober 2016